LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN AUDITED 2025

TINGKAT SATKER

298210

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sumenep, 7 Mei 2026

Kepala Kankemenag Kab. Sumenep



Abdul Wasid, M.Pd.I
NIP. 198010022005011005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan Laporan iv

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 3

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 5
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya

C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
C.32 Aset Tak Berwujud
C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40

VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan KH. Agus Salim Nomor 286 Kabupaten Sumenep
Website: kemenasumenep.com; Email : kabsumenep@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, .

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sumenep, 7 Mei 2026

Kepala Kankemenag Kab. Sumenep

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB SUMENEP
REPUBLIK INDONESIA

Abdul Wasid, M.Pd.I
NIP. 198010022005011005

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77.621.031 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp77.621.031 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp133.175.589.258 atau mencapai 99,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp133.196.930.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp13.229.772.827 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.908.125; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.223.864.702 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp13.229.772.827

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.536.664 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp133.373.159.507 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-133.342.622.843, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp47.084.367 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-133.295.538.476.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp13.427.343.076, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-133.295.538.476 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 133.097.968.227 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp13.229.772.827

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Periode Desember 2025 (2025-12)
LAMPIRAN	II	Neraca Percobaan Akrual dan Kas MonSAKTI
LAMPIRAN	III	Laporan Realisasi Anggaran (Face) MonSAKTI
LAMPIRAN	IV	Laporan Operasional MonSAKTI
LAMPIRAN	V	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	77.621.031	-	2.838.217
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**77.621.031**	**-**	**2.838.217**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	132.680.877.000	132.663.050.244	99,99	117.101.582.591
Belanja Barang	B.2.2	512.053.000	508.539.014	99,31	669.539.185
Belanja Modal	B.2.3	4.000.000	4.000.000	100,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**133.196.930.000**	**133.175.589.258**	**99,98**	**117.771.121.776**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	5.908.125	6.298.500
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**5.908.125**	**6.298.500**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	11.956.420.000	11.956.420.000
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	1.161.877.040	1.164.271.850
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	2.754.242.000	2.754.242.000
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(2.648.674.338)	(2.453.889.274)
Jumlah Aset Tetap		**13.223.864.702**	**13.421.044.576**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	-	-
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**-**
JUMLAH ASET		**13.229.772.827**	**13.427.343.076**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**-**	**-**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	13.229.772.827	13.427.343.076
JUMLAH EKUTAS		**13.229.772.827**	**13.427.343.076**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**13.229.772.827**	**13.427.343.076**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	30.536.664	536.664
Jumlah Pendapatan		**30.536.664**	**536.664**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	132.663.050.244	117.101.582.591
Beban Persediaan	D.4	17.546.973	15.370.500
Beban Barang dan Jasa	D.5	305.299.764	370.761.195
Beban Pemeliharaan	D.6	89.164.924	122.080.990
Beban Perjalanan Dinas	D.7	96.917.728	158.047.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	201.179.874	208.096.674
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**133.373.159.507**	**117.975.938.950**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(133.342.622.843)**	**(117.975.402.286)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	(60.418.000)
Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	47.084.367	1.553
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**47.084.367**	**(60.416.447)**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(133.295.538.476)**	**(118.035.818.733)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(133.295.538.476)**	**(118.035.818.733)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**13.427.343.076**	**13.694.878.250**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(133.295.538.476)**	**(118.035.818.733)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**-**	**-**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		**-**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	133.097.968.227	117.768.283.559
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(197.570.249)	(267.535.174)
EKUITAS AKHIR	E.6	**13.229.772.827**	**13.427.343.076**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Menteri Agama sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Kementerian Agama berkewajiban menyelenggaran akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dilingkungan kementerian yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan APBN, Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama dan diperbarui dengan adanya PMA Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara yang terdiri atas PA, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Struktur Organisasi Kementerian Agama telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya perubahan PMA dari PMA Nomor 19 Tahun 2019 menjadi PMA Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk bimbingan dan dukungan implementasi Akuntansi Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 286, Kabupaten Sumenep.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep berkomitmen dengan misi “meningkatkan pembinaan administrasi keuangan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga, membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan, mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya, menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek
  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang
  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	132.680.877.000	132.680.877.000
Belanja Barang	512.053.000	512.053.000
Belanja Modal	4.000.000	4.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**133.196.930.000**	**133.196.930.000**

Realisasi Pendapatan Rp77.621.031

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77.621.031 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp77.621.031. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan terdapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Pengembalian Belanja Pegawai TAYL dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	77.621.031	-
Jumlah	**-**	**77.621.031**	**-**

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 2.634,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	77.621.031	2.838.217	2.634,85
Jumlah	**77.621.031**	**2.838.217**	**2.634,85**

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak sebesar persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp77.621.031

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp77.621.031 dan Rp2.838.217. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 2.634,85 dari TA 2024 Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan terdapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	77.621.031	2.838.217	2.634,85
Jumlah	**77.621.031**	**2.838.217**	**2.634,85**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah	**77.621.031**	**2.838.217**	**2.634,85**

Realisasi Belanja Rp133.175.589.258

B.2 Belanja

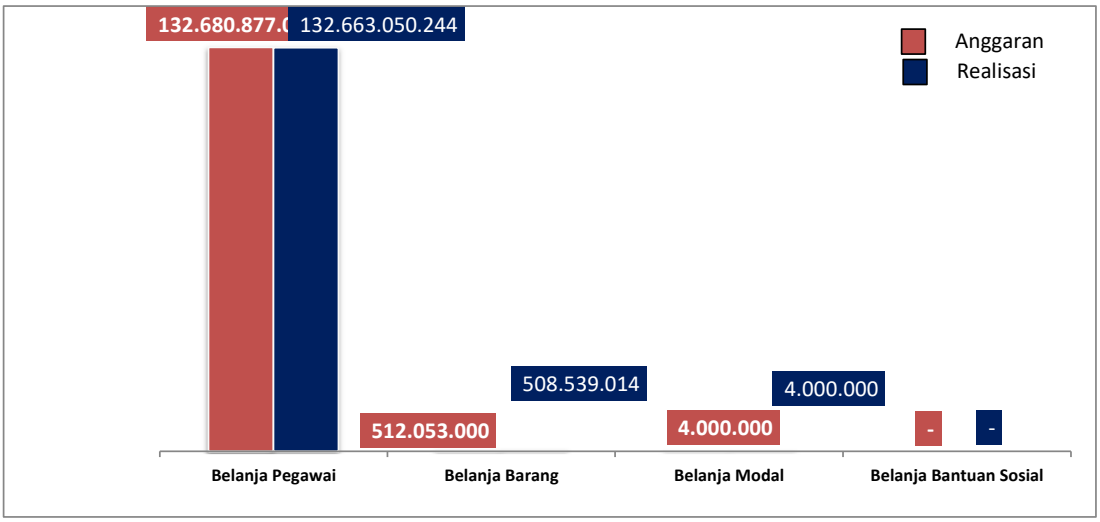
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp133.175.589.258 atau 99,98 % dari anggaran belanja sebesar Rp.133.196.930.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	132.680.877.000	132.663.050.244	99,99
Belanja Barang	512.053.000	508.539.014	99,31
Belanja Modal	4.000.000	4.000.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**133.196.930.000**	**133.175.589.258**	**99,98**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 13,08% Kenaikan realisasi belanja tahun berjalan disebabkan bertambahnya Jumlah Pegawai CPNS dan PPPK Tahun 2025. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	132.663.050.244	117.101.582.591	13,29
Belanja Barang	508.539.014	669.539.185	(24,05)
Belanja Modal	4.000.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**133.175.589.258**	**117.771.121.776**	**13,08**

Realisasi Belanja Pegawai Rp132.663.050.244

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp132.663.050.244 dan Rp117.101.582.591. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,53 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan realisasi belanja pegawai karena terdapat penambahan pegawai CPNS dan PPPK Tahun 2025

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	36.478.805.280	36.583.959.700	(0,29)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	442.186	484.470	(8,73)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3.040.175.350	3.071.181.820	(1,01)
Belanja Tunj. Anak PNS	941.725.548	966.818.212	(2,60)
Belanja Tunj. Struktural PNS	84.620.000	79.760.000	6,09
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.026.223.000	3.127.784.000	(3,25)
Belanja Tunj. PPh PNS	313.686.229	305.568.974	2,66
Belanja Tunj. Beras PNS	1.950.773.310	2.009.148.060	(2,91)
Belanja Uang Makan PNS	5.716.604.000	5.804.980.000	(1,52)
Belanja Tunjangan Umum PNS	157.390.000	126.655.000	24,27
Belanja Tunjangan Profesi Guru	38.966.466.020	41.808.397.100	(6,80)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	3.974.983.500	2.178.448.000	82,47
Belanja Gaji Pokok PPPK	13.694.608.998	6.054.804.000	126,18
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	220.733	100.737	119,12
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.101.520.292	501.683.760	119,56
Belanja Tunjangan Anak PPPK	340.459.835	158.129.696	115,30
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	999.805.000	581.840.000	71,84
Belanja Tunjangan Beras PPPK	952.926.500	429.016.080	122,12
Belanja Uang Makan PPPK	3.060.432.000	1.209.456.000	153,04
Belanja Tunjangan Umum PPPK	190.205.000	-	-
Belanja Uang Honor Tetap	-	-	-
Belanja Uang Lembur	15.144.000	15.123.000	0,14
Jumlah Belanja kotor	**115.007.216.781**	**105.013.338.609**	**9,52**
Pengembalian Belanja Pegawai	4.681.090	17.534.385	(73,30)
Jumlah Belanja	**115.002.535.691**	**104.995.804.224**	**9,53**

Realisasi Belanja Barang Rp508.539.014

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp508.539.014 dan Rp669.539.185. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 24,05% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang tahun berjalan dikarenakan berkurangnya Pagu Anggaran Belanja Operasional disebabkan terdapat proses Blokir Automatic Adjustment pada Tahun 2025

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	179.009.913	225.090.403	(20,47)
Belanja Barang Non Operasional	27.248.160	52.207.000	(47,81)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.757.952	18.650.000	0,58
Belanja Jasa	99.041.691	93.463.792	5,97
Belanja Pemeliharaan	87.563.570	122.080.990	(28,27)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	96.917.728	158.047.000	(38,68)
Jumlah Belanja Kotor	**508.539.014**	**669.539.185**	**(24,05)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**508.539.014**	**669.539.185**	**(24,05)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Realisasi Belanja Modal Rp4.000.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Kenaikan realisasi belanja modal tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya disebabkan Bertambahnya pagu Anggaran belanja Modal untuk pengadaan Stabilisator dan Lensa Smartphone.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**4.000.000**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**4.000.000**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4.000.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan realisasi belanja modal tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya disebabkan Bertambahnya pagu Anggaran belanja Modal untuk pengadaan Stabilisator dan Lensa

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**4.000.000**	**-**	**-**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**4.000.000**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Bendahara Pengeluaran	15.000.000	-
Jumlah	**15.000.000**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-		
Jumlah		

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya dan setara kas	Rp -	Rp -
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp5.908.125

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.908.125 dan Rp6.298.500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	5.908.125	6.298.500
Jumlah	**5.908.125**	**6.298.500**

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		**-**	**-**

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp11.956.420.000

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.956.420.000 dan Rp11.956.420.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**11.956.420.000**
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**11.956.420.000**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp1.161.877.040

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.161.877.040 dan Rp1.164.271.850. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**1.164.271.850**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6.394.810
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**1.157.877.040**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.152.392.140)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**5.484.900**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Tidak ada mutasi tambah peralatan dan mesin / aset tetap

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin / aset tetap

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp2.754.242.000

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.754.242.000 dan Rp2.754.242.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**2.754.242.000**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**2.754.242.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.496.282.198)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**1.257.959.802**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp2.648.674.338

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp2.648.674.338 dan Rp2.453.889.274. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.161.877.040	(1.152.392.140)	9.484.900
2	Gedung dan Bangunan	2.754.242.000	(1.496.282.198)	1.257.959.802
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**3.916.119.040**	**(2.648.674.338)**	**1.267.444.702**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp0

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.394.810
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	**6.394.810**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**6.394.810**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- -
- -
- -

Mutasi Kurang

- -

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

dan Amortisasi Aset Lainnya 0

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-
	-
	-
	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Pembayaran Pendapatan Rp0

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp13.229.772.827

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.229.772.827. dan Rp13.427.343.076. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp30.536.664

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp30.536.664 dan Rp536.664. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5.590,09. Hal tersebut disebabkan oleh 30536664. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah	**30.536.664,00**	**536.664,00**	**5.590,09**

Beban Pegawai Rp132.663.050.244

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp132.663.050.244 dan Rp117.101.582.591.

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	36.478.805.280	36.568.290.131	(0,24)
Beban Pembulatan Gaji PNS	440.096	466.006	(5,56)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3.039.221.350	3.071.181.820	(1,04)
Beban Tunj. Anak PNS	941.725.548	966.818.212	(2,60)
Beban Tunj. Struktural PNS	84.620.000	78.204.000	8,20
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.026.013.000	3.127.784.000	(3,25)
Beban Tunj. PPh PNS	313.686.229	305.568.974	2,66
Beban Tunj. Beras PNS	1.950.773.310	2.008.858.380	(2,89)
Beban Uang Makan PNS	5.716.498.550	5.804.980.000	(1,52)
Beban Tunjangan Umum PNS	157.390.000	126.655.000	24,27
Beban Tunjangan Profesi Guru	38.966.466.020	41.808.397.100	(6,80)
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	3.974.983.500	2.178.448.000	82,47
Belanja Gaji Pokok PPPK	13.694.608.998	6.054.804.000	126,18
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	220.733		
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.101.520.292		
Belanja Tunjangan Anak PPPK	340.459.835		
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	999.805.000		
Belanja Tunjangan Beras PPPK	952.926.500		
Belanja Uang Makan PPPK	3.057.022.450		
Beban Uang Honor Tetap	-		
Beban Uang Lembur	15.144.000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.113.416.415		
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	10.547.098.138		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**132.472.845.244**	**102.100.455.623**	**29,75**

Beban Persediaan Rp17.546.973

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.546.973 dan Rp15.370.500

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena tidak tersedianya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	17.546.973	15.370.500	14,16
Jumlah Beban Persediaan	**17.546.973,00**	**15.370.500**	**14,16**

Beban Barang dan Jasa Rp305.299.764

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp305.299.764 dan Rp370.761.195.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 17,66 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan belanja barang dan jasa pada Belanja Bahan. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	103.409.913	155.226.403	(33,38)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	75.600.000	69.864.000	8,21
Beban Bahan	20.563.160	12.207.000	68,45
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah	**305.299.764**	**370.761.195,00**	**(17,66)**

Beban Pemeliharaan Rp89.164.924

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp89.164.924 dan Rp122.080.990.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 26,96 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan perbaikan aset bmn masih bisa digunakan atau layak pakai Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.959.820	53.864.990	(33,24)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.603.750	68.216.000	(24,35)
Jumlah	**89.164.924**	**122.080.990**	**(26,96)**

Beban Perjalanan Dinas Rp96.917.728

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp96.917.728 dan Rp158.047.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 38,68 persen disebabkan oleh Penurunan beban perjalanan dinas karena Pelaksanaan kegiatan menunngu instruksi atau Surat Undangan dari Kanwil dan atau Dinas Lain.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	90.467.728	144.297.000	(37,30)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.450.000	8.250.000	(21,82)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	5.500.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Tetap	-	-	-
Jumlah	**96.917.728,00**	**158.047.000**	**(38,68)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehTerdapat kesalahan kode refrensi barang konsumsi . Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Penurunan beban bantuan sosial tidak ada alokasi pagu anggaran. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp201.179.874

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp201.179.874 dan Rp208.096.674.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Jumah Penyusutan	***201.179.874***	***208.096.674***	***(3,32)***
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	**201.179.874**	**208.096.674**	**(3,32)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-60.418.000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**2.300.000**	**(100)**

Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
0	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp47.084.367

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp47.084.367 dan Rp1.553.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	47.084.367	1.553,00	3.031.733,03
Jumlah	**47.084.367,00**	**1.553**	**3.031.733,03**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Rincian Beban Penanganan Covid-19 TA 2025 dan 2024

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp13.427.343.076,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.13.427.343.076,00 dan Rp.13.694.878.250,00

Defisit LO Rp.-133.295.538.476,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-133.295.538.476,00 dan Rp.-118.035.818.733,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini .

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp133.097.968.227

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.133.097.968.227 dan Rp.117.768.283.559. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	133.175.589.258
Diterima dari Entitas Lain	(77.621.031)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
	-
	-
Jumlah	**133.097.968.227**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 133.175.589.258, sedangkan DDEL sebesar Rp 77.621.031

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp13.229.772.827

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.13.229.772.827,00 dan Rp.13.427.343.076,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Berdasarkan Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahunan (Audited) 2025

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

Sekretariat Jenderal

Jl. KH. Agus Salim No. 286 Sumenep

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Tahunan (Audited), Tahun 2025 setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut;

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025,.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahunan (Audited) 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahunan (Audited) Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
   a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
   b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
   c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam sub fungsi,

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahunan (Audited) pada 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep antara lain sebagai berikut;

Informasi Kinerja Satuan Kerja Tahunan (Audited) Tahun 2025

Kementerian	: 025	Kementerian Agama
Unit Organisasi	: 01	Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	: 298210	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Fungsi	: 09	Agama
Sub Fungsi	: 09.01	Peningkatan Kehidupan Beragama
Program	: DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Lokasi	: Sumenep	

No	Kode KEG/KRO/RO	Nama KEG/KRO/RO	Belanja			Belanja				Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5620 5620.QDB 5620.QDB.001	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100%	1	1	Lembaga. Unit Kerja. Tim	100%	Kegiatan Telah dilaksanakan
Total			**Rp 5.000.000**	**Rp 5.000.000**	**100%**	**1**	**1**		**100%**	

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Tahunan (Audited), Tahun 2025 setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut;

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025,.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahunan (Audited) 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahunan (Audited) Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
   a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
   b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
   c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi,

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahunan (Audited) pada 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep antara lain sebagai berikut;

Informasi Kinerja Satuan Kerja Tahunan (Audited) Tahun 2025

Kementerian	: 025	Kementerian Agama
Unit Organisasi	: 01	Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	: 298210	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Fungsi	: 09	Agama
Sub Fungsi	: 09.90	Pelayanan Keagamaan Lainnya
Program	: WA	Program Dukungan Manajemen
Lokasi	: Sumenep	

No	Kode KEG/KRO/RO	Nama KEG/KRO/RO	Belanja			Belanja				Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								
	2098.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						Layanan. Laporan.		
1	2098.EBA.957	Layanan Hukum	Rp 3.405.000	Rp 3.405.000	100%	1	1	Dokumen. Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan telah dilaksanakan

Informasi Kinerja Satuan Kerja Tahunan (Audited) Tahun 2025

Kementerian : 025 Kementerian Agama
Unit Organisasi : 01 Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : 298210 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Fungsi : 09 Agama
Sub Fungsi : 09.90 Pelayanan Keagamaan Lainnya
Program : WA Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Sumenep

No	Kode KEG/KRO/RO	Nama KEG/KRO/RO	Belanja			Belanja				Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2099 2099.EBC 2099.EBC.954	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Layanan Manajemen SDM Internal Layanan Manajemen SDM	Rp 3.405.000	Rp 3.405.000	100%	40	40	Orang. Layanan. Rekomendasi	100,00%	Kegiatan telah dilaksanakan
3	2100 2100.EBA 2100.EBA.994	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	Rp 32.704.275.000	Rp 32.693.030.220	100%	12	12	Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
4	2100 2100.EBD 2100.EBD.955	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Manajemen Keuangan	Rp 3.405.000	Rp 3.405.000	100%	4	4	Dokumen. Layanan. Laporan. Rekomendasi	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
5	2101 2101.EBA 2101.EBA.960	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 3.405.000	Rp 3.315.000	97%	1	1	Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
6	2102 2102.EBD 2102.EBD.952	Pembinaan Administrasi Perencanaan Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 3.405.000	Rp 2.230.000	65%	1	1	Dokumen. Layanan. Laporan. Rekomendasi	100%	Kegiatan telah dilaksanakan

Informasi Kinerja Satuan Kerja Tahunan (Audited) Tahun 2025

Kementerian : 025 Kementerian Agama
Unit Organisasi : 01 Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : 298210 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Fungsi : 09 Agama
Sub Fungsi : 09.90 Pelayanan Keagamaan Lainnya
Program : WA Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Sumenep

No	Kode KEG/KRO/RO	Nama KEG/KRO/RO	Belanja			Belanja				Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2102 2102.EBD 2102.EBD.953	Pembinaan Administrasi Perencanaan Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 3.405.000	Rp 3.405.000	100%	1	1	Dokumen. Layanan. Laporan. Rekomendasi	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
8	2103 2103.EBA 2103.EBA.962	Pembinaan Administrasi Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Umum	Rp 300.000	Rp 299.160	100%	1	1	Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
9	2103 2103.EBA 2103.EBA.994	Pembinaan Administrasi Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	Rp 445.157.000	Rp 444.493.354	100%	1	1	Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
10	2103 2103.EBA 2103.EBB.951	Pembinaan Administrasi Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Sarana Internal	Rp 5.686.000	Rp 5.686.000	100%	5	5	Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
11	2106 2106.EBA 2106.EBA.958	Pembinaan Administrasi Informasi Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 3.405.000	Rp 3.405.000	100%	1	1	Layanan. Laporan. Dokumen. Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
Total			**Rp 33.179.253.000**	**Rp 33.166.078.734**	**100%**	**68**	**68**		**100,00%**	

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Tahunan (Audited), Tahun 2025 setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut;

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025,.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahunan (Audited) 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahunan (Audited) Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
   a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
   b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
   c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam sub fungsi,

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahunan (Audited) pada 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep antara lain sebagai berikut;

Informasi Kinerja Satuan Kerja Tahunan (Audited) Tahun 2025

Kementerian	: 025	Kementerian Agama
Unit Organisasi	: 01	Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	: 298210	Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep
Fungsi	: 10	Pendidikan
Sub Fungsi	: 10.90	Pendidikan Dan Kebudayaan Lainnya
Program	: WA	Program Dukungan Manajemen
Lokasi	: Sumenep	

No	Kode KEG/KRO/RO	Nama KEG/KRO/RO	Belanja			Belanja				Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6708 6708.EBA 6708.EBA.994	Dukungan Manajemen Pendidikan Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	Rp 100.012.677.000	Rp 100.004.782.114	100%	1	1	Layanan. Laporan. Dokumen . Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan Telah dilaksanakan
Total			**Rp 100.012.677.000**	**Rp 100.004.782.114**	**100%**	**1**	**1**		**100%**	

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Rincian Output Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Tahunan (Audited), Tahun 2025 setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut;

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025,.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahunan (Audited) 2025, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahunan (Audited) Tahun 2025.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
   a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
   b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
   c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
6. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Tahunan (Audited) Tahun 2025 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam sub fungsi,

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahunan (Audited) pada 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep antara lain sebagai berikut;

Informasi Kinerja Satuan Kerja Tahunan (Audited) Tahun 2025

Kementerian	: 025	Kementerian Agama
Unit Organisasi	: 01	Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja	: 298210	Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep
Fungsi	: 10	Pendidikan
Sub Fungsi	: 10.90	Pendidikan Dan Kebudayaan Lainnya
Program	: WA	Program Dukungan Manajemen
Lokasi	: Sumenep	

No	Kode KEG/KRO/RO	Nama KEG/KRO/RO	Belanja			Belanja				Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6708 6708.EBA 6708.EBA.994	Dukungan Manajemen Pendidikan Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	Rp 100.012.677.000	Rp 100.004.782.114	100%	1	1	Layanan. Laporan. Dokumen . Rekomendasi. Unit	100%	Kegiatan Telah dilaksanakan
Total			**Rp 100.012.677.000**	**Rp 100.004.782.114**	**100%**	**1**	**1**		**100%**	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298210 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 3:25
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	133,196,930,000	133,196,930,000	0
2	Belanja	133,180,270,348	133,180,270,348	0
3	Pengembalian Belanja	-4,681,090	-4,681,090	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	77,621,031	77,621,031	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (298210) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:00 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	5,908,125	6,298,500	(390,375)	(6.20)
JUMLAH ASET LANCAR	**5,908,125**	**6,298,500**	**(390,375)**	**(6.20)**
ASET TETAP				
Tanah	11,956,420,000	11,956,420,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	1,161,877,040	1,164,271,850	(2,394,810)	(0.21)
Gedung dan Bangunan	2,754,242,000	2,754,242,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,648,674,338)	(2,453,889,274)	(194,785,064)	7.94
JUMLAH ASET TETAP	**13,223,864,702**	**13,421,044,576**	**(197,179,874)**	**(1.47)**
JUMLAH ASET	**13,229,772,827**	**13,427,343,076**	**(197,570,249)**	**(1.47)**

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	13,229,772,827	13,427,343,076	(197,570,249)	(1.47)
JUMLAH EKUITAS	**13,229,772,827**	**13,427,343,076**	**(197,570,249)**	**(1.47)**
JUMLAH EKUITAS	**13,229,772,827**	**13,427,343,076**	**(197,570,249)**	**(1.47)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**13,229,772,827**	**13,427,343,076**	**(197,570,249)**	**(1.47)**

Keterangan :

FINAL

SUMENEP, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ABDUL WASID

NIP. 198010022005011005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP 298210

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:51 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**77,621,031**	**77,621,031**	**0**	**0**	**2,838,217**	**(2,838,217)**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	77,621,031	77,621,031	0	0	2,838,217	(2,838,217)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**77,621,031**	**77,621,031**	**0**	**0**	**2,838,217**	**(2,838,217)**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	133,196,930,000	133,175,589,258	(21,340,742)	100	117,797,070,000	117,771,121,776	25,948,224	100
1. Belanja Pegawai	132,680,877,000	132,663,050,244	(17,826,756)	100	117,119,217,000	117,101,582,591	17,634,409	100
2. Belanja Barang	512,053,000	508,539,014	(3,513,986)	99	677,853,000	669,539,185	8,313,815	99
3. Belanja Modal	4,000,000	4,000,000	0	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN AGAMA 025**
ESELON I : **SEKRETARIAT JENDERAL 01**
SATUAN KERJA : **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP 298210**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:51 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**133,196,930,000**	**133,175,589,258**	**(21,340,742)**	**100**	**117,797,070,000**	**117,771,121,776**	**25,948,224**	**100**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

SUMENEP, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ABDUL WASID
NIP 198010022005011005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (298210) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:52 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,427,343,076	13,694,878,250	(267,535,174)	(1.95)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(133,295,538,476)	(118,035,818,733)	(15,259,719,743)	12.93
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	133,097,968,227	117,768,283,559	15,329,684,668	13.02
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(197,570,249)	(267,535,174)	69,964,925	(26.15)
EKUITAS AKHIR	13,229,772,827	13,427,343,076	(197,570,249)	(1.47)

Keterangan :

FINAL

SUMENEP, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ABDUL WASID

NIP. 198010022005011005

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(0500) JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(298210) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:56 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	30,536,664	536,664	30,000,000	5,590.09
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	30,536,664	536,664	30,000,000	5,590.09
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	30,536,664	536,664	30,000,000	5,590.09
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	132,663,050,244	117,101,582,591	15,561,467,653	13.289
Beban Persediaan	17,546,973	15,370,500	2,176,473	14.16
Beban Barang dan Jasa	305,299,764	370,761,195	(65,461,431)	(17.656)
Beban Pemeliharaan	89,164,924	122,080,990	(32,916,066)	(26.962)
Beban Perjalanan Dinas	96,917,728	158,047,000	(61,129,272)	(38.678)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(0500) JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(298210) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP**

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:56 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	201,179,874	208,096,674	(6,916,800)	(3.324)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	133,373,159,507	117,975,938,950	15,397,220,557	13.051
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(133,342,622,843)	(117,975,402,286)	(15,367,220,557)	13.026
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(60,418,000)	60,418,000	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	2,300,000	(2,300,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	62,718,000	(62,718,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	47,084,367	1,553	47,082,814	3,031,733.033
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	47,084,367	1,553	47,082,814	3,031,733.033
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	47,084,367	(60,416,447)	107,500,814	(177.933)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(133,295,538,476)	(118,035,818,733)	(15,259,719,743)	12.928
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(133,295,538,476)	(118,035,818,733)	(15,259,719,743)	12.928

Keterangan :

FINAL

SUMENEP, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ABDUL WASID

NIP 198010022005011005

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN AUDITED TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (298210) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√	Tidak
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak

	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/99		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Ya
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Ya
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Ya
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Ya
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**

1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	**Rp.**		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	**Rp.**		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**		√	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		√	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Tidak
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**

1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		√	Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		√	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp..... disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp....., transaksi Koreksi			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)		√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya

	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan,				

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Abdul Wasid, M.Pd.I
NIP. 198010022005011005

Sumenep , 07 Mei 2026
Penelaah,
Penyusun Laporan Keuangan

Ali Wahyudi
NIP. 198502152014111002